

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. (Jakarta: Gunung Agung, 2002).
- Effendie, Bachtiar. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*. (Bandung: Alumni, 1993).
- Hadjon, Philpus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013).
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayu Publlishing, 2006).
- Ilmar, Aminuddin. *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum Masyarakat dan Pembangunan Hukum Nasional*. (Bandung: Bina Citra, 1995).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Nugroho, Sigit Supto. S.H. M.Hum. et.al. *Hukum Agraria Indonesia*. (Solo: Kafilah publishing, 2017).
- Parlindungan, A.P. *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Cetakan Ke-9. (Bandung: Mandar Maju, 2002).
- Parlindungan, A.P. *Konversi Hak-Hak Atas Tanah*. (Jakarta: Mandar Maju, 1990).
- Parlindungan, A.P. *Pedoman Pelaksanaan UUPA Dan Tata Cara PPAT*. Cetakan ke-6. (Bandung: CV Mandar Maju, 1990).
- Parlindungan, A.P. *Pendaftaran Tanah Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1999).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu hukum*. Cetakan ke-8. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Cetakan Ke-2. (Jakarta: Prenada Media, 2005).

Santoso, Urip. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Perolehan Hak Atas Tanah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Sumarja, FX. S.H., MH. *Hukum Pendaftaran Tanah*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010).

Supriyadi, *Hukum Agraria*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Suwardi, *Hukum Agraria*. (Jakarta: Badan Penertbit IBLM, 2005).

Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

Sofwan, Sri Soedewi Maschun. *Hukum Perdata: Hak Jaminan Atas Tanah*. (Yogyakarta: Liberty, 1981).

B. Peraturan atau Perundang-Undangan

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631*).

Indonesia, Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043*).

Indonesia. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 722*).

Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Memberikan Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Indonesia. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 440*).

Indonesia. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1514*).

Indonesia. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12*).

Indonesia. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Indonesia. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630*).

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696*).

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Atas Tanah. (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643*).

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1571*).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952*).

C. Jurnal

- Hasanah, Ulfia. "STATUS KEPEMILIKAN TANAH HASIL KONVERSI HAK BARAT BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1960", *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 2 Februari 2012.
- Mintaraningrum, Yuyun. "Aspek Kepastian Hukum Dalam Penerbitan Sertipikat Hak Tanah (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor Putusan PTUN Nomor 24/G/TUN/2000/PTUN.Smg)", *Jurnal Repertorium*, Edisi No. 2 Tahun 2015.
- Sahono, Linda M. "Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Dan Implikasi Hukumnya", *Jurnal Perspektif*, Edisi No. 2 Tahun 2021.
- Usman, Abdul Hamid. "Perlindungan Hukum Hak Milik atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria", *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Edisi No. 2 Tahun 2020.
- Pansariang, Juosfiel Sadpri. "Proses dan Syarat Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia", *Jurnal Lex Privatum*, Edisi No.3 Tahun 2014.